

## PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI PORIS PELAWAD 5 KOTA TANGERANG

Haikal Adriansyah<sup>1</sup>, Maftuhah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, [haikaladriansyah21@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:haikaladriansyah21@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>2</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, [maftuhah@uinjkt.ac.id](mailto:maftuhah@uinjkt.ac.id)

**Abstrak:** This study aims to examine the management of education financing at Poris Pelawad 5 Elementary School, Tangerang City. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method. The data collection techniques used are interviews, observations, and document studies, with research results from the principal, treasurer, and one teacher. The results showed that in the process of preparing the RKAS (Activity Plan and School Budget) was carried out by the principal and treasurer and assisted by the school management team. The management of education financing is carried out in three ways, namely, 1), planning, where activities related to schools have been prepared in the RKAS prepared by the school every year at the beginning of the school year. 2), Implementation, where for the implementation of financing there are receipts such as, BOS (School Operational Assistance) of the central government, BOSDA (School Operational Assistance) of local governments, and community participation. Expenditure, referring to 8 (eight) national standards of education in schools. 3), Evaluation, this is carried out by SDN Poris Pelawad 5 Tangerang City twice every year, in the middle and at the end of the school year, by holding meetings with relevant parties. And from the results of the evaluation, it is used as a reference by the school for the future.

**Keywords:** Management, Financing,

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen, dengan hasil penelitian dari kepala sekolah, bendahara, dan satu orang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara dan dibantu oleh tim manajemen sekolah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan melalui tiga cara yaitu, 1), perencanaan, dimana kegiatan yang berhubungan dengan sekolah sudah disusun dalam RKAS yang disusun oleh sekolah setiap tahunnya pada awal tahun ajaran. 2), Pelaksanaan, dimana untuk pelaksanaan pembiayaan adanya penerimaan seperti, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah pusat, BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Pengeluaran, mengacu kepada 8 (delapan) standar nasional pendidikan disekolah. 3), Evaluasi, hal ini dilakukan oleh SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang dua kali setiap tahunnya, dipertengahan dan diakhir tahun ajaran, dengan mengadakan rapat kepada pihak yang terkait. Dan dari hasil evaluasi dijadikan acuan oleh sekolah untuk kedepannya.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Pembiayaan,

## Pendahuluan

Pembiayaan pendidikan (*financing of education*) merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua negara di dunia. Pentingnya pembiayaan pendidikan jelas sebagai salah satu hal fundamental dalam menjalankan seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah, tanpa adanya pembiayaan yang dikelola dengan baik akan menghambat seluruh lini kegiatan di sekolah seperti pengadaan sarana dan prasarana, honor guru dan tenaga pendidikan, serta bangunan.

Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan biaya. Hal ini sudah menjadi fakta dimana pembiayaan pendidikan menjadi salah satu faktor disamping faktor-faktor lainnya dalam mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan. Demi mencapai kemajuan bagi bangsa Indonesia, peran pemerintah sangat penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia dimana saat ini pemerintah sudah menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat Indonesia dan jelas bahwa dalam PP No. 47 Tahun 2008 Bab VI Pasal 9 Ayat 1: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Akan tetapi amanat tersebut masih belum dapat terimplementasi dengan baik karena terbatasnya anggaran dan belum meratanya anggaran tersebut. walaupun “pemerintah telah menyisihkan anggaran 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan APBD) untuk pendidikan tetapi itu masih perlu dijabarkan lebih rinci.

Pembiayaan Pendidikan sebagai sebuah kajian sekiranya tidak dapat dipahami secara komprehensif tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Ada anggapan bahwa membicarakan pembiayaan Pendidikan yang tidak lepas dari persoalan “ekonomi Pendidikan.” Bahkan secara tegas Mark Blaug mengemukakan bahwa “*the economics of education is a branch of economics.*” Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan Pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan Pendidikan menurut Blaug sebagai

*the costing and financing of school places*, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi Pendidikan<sup>1</sup>.

Pada dasarnya tujuan pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah bagaimana pembiayaan untuk pendidikan ini dapat menghasilkan produktivitas yang bermutu dalam proses belajar mengajar. Untuk Pencapaian sasaran mutu harus diimbangi dengan biaya yang mencukupi. Karena dengan meningkatkan kualitas sumber daya dan sarana dan prasarana harus didukung dengan biaya yang tidak sedikit.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan melalui tiga cara yaitu, 1), perencanaan, yang berupa proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar atau tolok ukur keberhasilan sesuatu kegiatan<sup>2</sup>, Pelaksanaan, merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap<sup>3</sup>. Dimana untuk pelaksanaan pembiayaan adanya penerimaan seperti, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah pusat, BOP (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah daerah, dan sumbangan sukarela. Pengeluaran, seperti untuk gaji, guru, gaji tenaga kependidikan, transport, pemeliharaan sarana prasarana, kurikulum, kegiatan kesiswaan, dan langganan daya dan jasa. 3), Evaluasi, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan<sup>4</sup>. Dan dari hasil evaluasi tadi dapat dijadikan acuan oleh sekolah untuk kedepannya.

Hasil penelitian oleh Ana Fitria & Muhammad Tsaqif juga diperoleh bahwa efektifnya suatu pengelolaan pembiayaan Pendidikan dipengaruhi juga oleh beberapa kegiatan seperti perencanaan RKAS, sumber-sumber dana, distribusi, pengawasam dan evaluasi pembiayaan pendidikan di sekolah<sup>5</sup>. Dalam hal ini, pengelolaan pembiayaan Pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam sebuah

---

<sup>1</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 78

<sup>2</sup> Akhmad, "Perencanaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Globalisasi," *Jurnal Scholastica*, Tahun II, No.2 (November 2020), 97

<sup>3</sup> Sri, Minarti, *Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 216

<sup>4</sup> Muhammad, Nur et. al, "Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie," *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Tahun IV, No.1 (Februari 2016), 99

<sup>5</sup> Muhammad, Tsaqif, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan," (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 76.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuktikan dengan bukti fisik yang berbentuk laporan keuangan yang jelas, dalam kurun jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang.

### **Metode Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 1) Wawancara, Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama dengan kepala sekolah SDN Poris Pelawad 5, Bendahara dan pihak terkait dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah. 2) Observasi, Teknik ini dilakukan penulis dengan mengamati dan mendatangi langsung objek penelitian yang dapat memberikan gambaran perilaku kewargaan organisasional. Disini penulis mendatangi langsung objek penelitian yaitu SDN Poris Pelawad 5. 3) Dokumentasi, Teknik terakhir adalah teknik dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Data yang didapatkan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian tidak dapat langsung digunakan, melainkan perlu dilakukan analisis sehingga data dapat mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. penulis dalam menganalisis data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

### **Pembahasan**

#### **A. Konsep Pembiayaan Pendidikan**

##### **1. Definisi Pembiayaan Pendidikan**

Biaya dalam Bahasa Inggris biasa menggunakan istilah *cost*, *financial*, *expenditure*. Biaya menurut para akuntan dalam Usry dan Hammer adalah

sebagai *cost as an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit*. Cost sinonim dengan expense yang digunakan untuk mengukur pengeluaran (outflow) barang atau jasa yang disandingkan dengan pendapatan untuk mengukur pendapatan<sup>6</sup>.

Pembiayaan Pendidikan, merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Pendapatan atau sumber dana Pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. Bowen secara lebih terperinci menjelaskan bahwa: *Revenues are derived from several sources: federal, state, and local appropriations, tuitions, gifts and grant from private individuals and corporations, endowment, and sales of goods and service. The revenue theory of educational cost is subject to an important qualification*<sup>7</sup>.

Adapun bagaimana penggunaan dana tersebut, menurut John, Morphet dan Alexanders setiap sekolah seharusnya menetapkan rencana-rencana yang menjadi prioritas pembiayaan Pendidikan secara komprehensif. Perencanaan yang komprehensif dari sebuah program pembiayaan sekolah melibatkan pembuatan keputusan yang kritis dalam beberapa wilayah-wilayah berikut ini: a) Program Pendidikan yang harus dibiayai, b) System pajak yang digunakan untuk pembiayaan program tersebut, c) System alokasi dana negara untuk wilayah atau daerah persekolahan.

Pembiayaan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan dan pemerintah memiliki peranan besar di dalamnya. Menurut West<sup>8</sup>, peran pemerintah mencakup pada perlindungan pemerintah terhadap anak di bawah umur, pengaruh eksternal peran Pendidikan agar demokrasi berjalan, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi semua warga negara, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta tuntutan “norma umum” dan pengaruh Pendidikan.

---

<sup>6</sup> Akdon et. al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 5.

<sup>7</sup> Akdon et. al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* ....., 25

<sup>8</sup> Akdon et. al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* ....., 15

Berkenaan dengan tingkatannya, pembiayaan Pendidikan terjadi di beberapa tempat atau tingkatan, yang meliputi Lembaga satuan Pendidikan yaitu sekolah, pengguna jasa Pendidikan yaitu orang tua atau siswa, dan administrator Pendidikan dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat pusat. Selain itu, di masing-masing tingkatan, biaya Pendidikan mencakup beberapa atau banyak komponen biaya. Dengan demikian, analisis biaya Pendidikan akan lebih bermanfaat bila menggunakan pendekatan, tingkatan, dan komponen biaya Pendidikan.

Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasi. Oleh karena itu, perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa Pendidikan. Demikian pula system pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung system pembiayaan Pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan Pendidikan termasuk untuk Pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari factor kebutuhan dan ketersediaan Pendidikan, tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan versus *social benefit* secara luas, pengaruh factor politik dan ekonomi terhadap sektor Pendidikan.

Menurut Levin, pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik Pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah yakni *school revenue*, *school expenditures*, *capital*, dan *current cost*. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi setiap sekolah berbeda<sup>9</sup>.

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa

---

<sup>9</sup> Akdon et. al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* ....., 23

berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, gaji guru. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar<sup>10</sup>. Sementara itu Supriadi<sup>11</sup> membagi biaya ke dalam tiga kategori yaitu:

a. Biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*):

Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).

b. Biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*):

Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial.

c. Biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*)

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Kebanyakan biaya langsung berasal dari sistem persekolahan sendiri seperti SPP, dan sumbangan orang tua murid untuk pendidikan atau yang dikeluarkan sendiri oleh siswa untuk membeli perlengkapan dalam melaksanakan proses pendidikannya, seperti biaya buku, peralatan dan uang saku. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar.

---

<sup>10</sup> Nanang, Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: RosdaKarya, 2002), 23.

<sup>11</sup> Armidah, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Efisiensi dan Keefektifan Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar," *Jurnal Madrasah, Tahun III, No.2* (Juni 2011), 221

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1, menjelaskan jenis-jenis biaya pendidikan meliputi:

a. Biaya satuan pendidikan, di antaranya:

- 1) Biaya investasi, yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan;
- 2) Biaya operasi, yang terdiri atas biaya personalia dan biaya nonpersonalia;
- 3) Bantuan biaya pendidikan; dan
- 4) Beasiswa (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 2).

b. Biaya penyelenggaraan dana atau pengelolaan pendidikan, meliputi:

- 1) Biaya investasi, yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan;
- 2) Biaya operasi, yang terdiri atas biaya personalia dan nonpersonalia (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 3).

c. Biaya pribadi peserta didik, meliputi:

- 1) Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan, tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen, tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus bagi guru dan dosen, maslahat tambahan bagi guru dan dosen, dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar;
- 2) Biaya personalia penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural bagi pejabat struktural, dan tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional (PP No. 40 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 4).

Berdasarkan uraian jenis-jenis biaya pendidikan dijelaskan bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian luas. Hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan



penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicarikan berbagai alternatif solusinya

### 3. Sumber-sumber biaya Pendidikan

Menyangkut sumber biaya, Bray<sup>12</sup> menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah keseluruhan input yang dapat diperoleh dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan agen-agen lain yang relevan. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pada tingkat sekolah, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Dalam hal ini yang tercatat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sebagian besar biaya pendidikan ditingkat sekolah berasal dari pemerintahan pusat, sedangkan bagi sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Pada tahun 1991/1992, sebanyak 92,39% penerimaan biayaa pendidikan di Sekolah Dasar (SD) berasal dari pemerintahan pusat, hanya 0,23% dari pemerintahan daerah, 6,98% dari iuran siswa yang ditampung melalui BP3 (Badan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan) 0,20% dari masyarakat, 0,20% dari sumber-sumber lain<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Irsyad, Zamjani, et. al , "Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Satuan Pendidikan Formal," (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), 5

<sup>13</sup> Dedi, Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2004), 63

Sumber pembiayaan pendidikan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

- a) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun keduanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
- b) Orang tua atau peserta didik;
- c) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan dan tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat<sup>14</sup>.

## **B. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan**

Mengenai pengelolaan menurut Winarto Haiseno didalam buku Suharsimi Arikunto menjelaskan, pengelolaan adalah substantif dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari merencanakan, pengorganisasian, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan selanjutnya pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya<sup>15</sup>.

Adapun Marno dan Triyo Supriyatno dalam buku Sri Minarti (Minarti, 2011a) memberikan definisi tentang manajemen keuangan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana (*raising of funds*) dan mengalokasikan (*allocation of funds*) dana tersebut sehingga tujuan organisasi Pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Dengan demikian, kegiatan manajemen tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Begitu

---

<sup>14</sup> Nanang, Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: RosdaKarya, 2002), 23

<sup>15</sup> Suharsimi, Arikunto, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 8.

pula dalam manajemen keuangan di sekolah kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

Tugas manajemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu *financial planning*, *implementation*, dan *evaluation*. Pada dasarnya, perencanaan financial yang disebut *budgeting*, merupakan kegiatan mengoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. *Implementation involves accounting* (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. *Evaluation involves* merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran<sup>16</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan sama dengan manajemen pembiayaan, dan kegiatan yang dilakukan di tempat dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dalam kegiatan pengelolaan di tempat dimulai dengan perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

#### 1) Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan keuangan sekolah yang disusun secara baik akan sekaligus merupakan kebijaksanaan penggunaannya di sekolah dan akan mempermudah melaksanakan kegiatan pengawasannya. Perencanaan dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan pengurus komite sekolah. Mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam waktu tertentu.

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.

Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

---

<sup>16</sup> Sri, Minarti, *Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 213

a. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu 1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, 2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, 3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.

c. Efektivitas

Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika didefinisikan, efektivitas lebih dalam lagi karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness characterized by qualitative outcomes* (efektivitas lebih menekankan pada kualitatif out comes). Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang

bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency characterized by quantitative outputs* (efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan [input] dan keluaran [output] atau antara daya dan hasil). Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya<sup>17</sup>. Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis, serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Perencanaan sebagai kegiatan rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak didasarkan pada ramalan yang intuitif<sup>18</sup>.

Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, berarti perencanaan meliputi tahap-tahap kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan kegiatan tersebut dapat dijadikan panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi. Sedangkan, tujuan perencanaan arahnya agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Perencanaan anggaran sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek

---

<sup>17</sup> Sri, Minarti, *Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 216

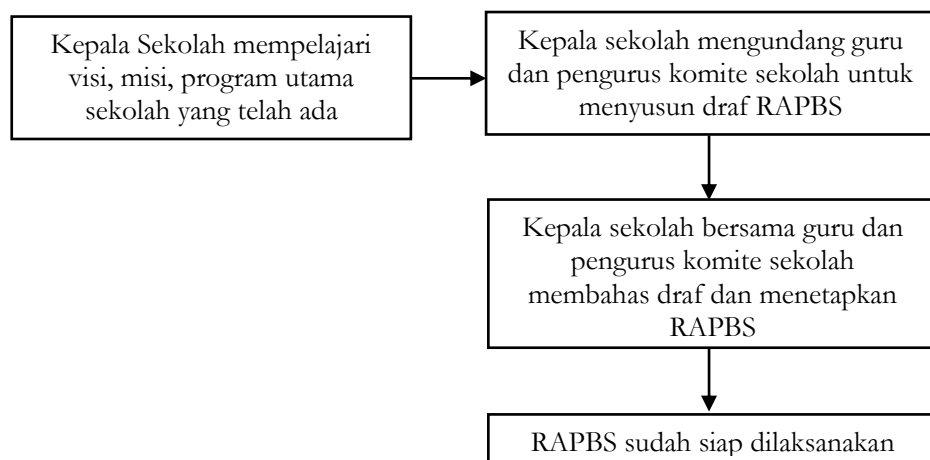
<sup>18</sup> Sri, Minarti, *Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 228

maupun jangka panjang, pada kerangka ini bisa diformat perencanaan keuangan sekolah, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada suatu lembaga pendidikan hal yang harus dilakukan dalam mengelola pembiayaan di sekolah adalah dengan membuat perencanaan anggaran atau biasa disebut sebagai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kepala sekolah dan seluruh bawahan bersamasama menyusun RKAS. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendapatan dan pengeluaran yang akan dijalankan selama satu tahun, sehingga suatu kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan suatu bagian dari rencana operasional tahunan. RKAS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi pembangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja dan kursi. Penyusunan RKAS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, pendidik, komite sekolah, staf TU, dan komunitas sekolah. RKAS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal<sup>19</sup>.

Proses penyusunan RKAS yang partisipatif dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



**Bagan 1: Proses penyusunan RKAS**

<sup>19</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 164-165

Dari uraian diatas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yaitu proses pengumpulan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang telah ditentukan terkait dengan pendapatan biaya dan pengeluaran yang akan dilakukan

## 2) Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh didalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif, dan efisien<sup>20</sup>.

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), tahapan pengelolaan selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran dari sumber sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Kegiatan dari pengelolaan yang kedua adalah pelaksanaan atau kegiatan pengurusan keuangan atau pembiayaan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenaldengan istilah ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu penerimaan, menyimpan dan mengeluarkan uang.

Sebelum biaya didistribusikan, sekolah membuat Prosedur pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah memadukan antara aturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak bisa dirubah oleh pihak sekolah dalam hal pengalokasian anggaran.

---

<sup>20</sup> Sri, Minarti, *Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 216

Dalam hal ini pihak sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana pengguna. Pembukuan mencakup dua hal, yaitu : pengurus yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis pengurus kedua disebut juga dengan pengurus bendaharawan. Lain hal, fungsi kepala sekolah dapat dikatakan sebagai manajerial yang berwenang dalam segi hal penggunaan dana yang telah diperoleh, yang kemudian menunjuk satu bendaharawan untuk membuat laporan anggaran untuk nantinya dipertanggungjawabkan.

### 3) Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur <sup>21</sup>.

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi dalam administrasi pembiayaan merupakan kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja individu dan tingkat efisiensi penggunaan metode atau alat bantu tertentu dalam usaha guna mencapai tujuan pembiayaan. Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan <sup>22</sup>.

Mengamati tingkat efisiensi yaitu dengan menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar besarnya dengan resiko yang sekecilkecilnya. Evaluasi pembiayaan pendidikan berguna sebagai bentuk

---

<sup>21</sup> Muhammad, Rojli et. al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 12

<sup>22</sup> Muhammad, Rojli et. al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam ...* , 12



pertimbangan menurut seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya yaitu untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya<sup>23</sup>.

Tujuan evaluasi pembiayaan pendidikan ialah untuk mengetahui berapa besar dana yang telah dihabiskan dalam anggaran tersebut serta untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah direncanakan dan yang telah diselenggarakan telah sesuai dengan harapan, dan dengan evaluasi tersebut semua pembiayaan yang disalurkan di dunia pendidikan akan berjalan dengan semestinya.

Pertanggungjawaban pembiayaan proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi pertanggung jawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran sesuai dengan perencanaan. Atau dapat secara lebih rinci bisa ditegaskan bahwa pertanggung jawaban keuangan lembaga pendidikan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan proses pendidikan apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **C. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SDN Poris Pelawad 5**

Hasil penelitian tentang pembiayaan Pendidikan di SDN Poris pelawad 5 berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi langsung ke lokasi dan juga melalui percakapan dengan kepala sekolah SDN Poris Pelawad 5 bapak Karna Jumena, S.Pd. dapat diketahui bahwa pengelolaan pembiayaan Pendidikan di SDN Poris Pelawad 5 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, selain itu juga mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah serta Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 tahun 2014.

Kemudian Keuangan dan pembiayaan SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang bersifat desentral, dimana dalam proses perencanaan pembiayaan sekolah dilakukan oleh seluruh elemen tim manajemen sekolah yang terdiri dari

---

<sup>23</sup> Muhammad, Rojli et. al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 13.

Kepala Sekolah, bendahara dan anggota yang merupakan dari unsur guru, unsur komite dan unsur orang tua siswa. Selain itu termasuk juga instansi dari dinas Pendidikan selaku pengawas dan pembina, dan kemudian rencana yang sudah disusun tersebut akan dibahas dalam rapat bersama dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah.

Hal tersebut disampaikan oleh kepala sekolah SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang:

*“Untuk pengelola pembiayaan di sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara dan anggota yang merupakan dari unsur guru, unsur komite dan unsur orang tua siswa. Selain itu termasuk juga instansi dari dinas Pendidikan selaku pengawas dan pembina.”*

SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah dengan mengadakan rapat penyusunan RKAS. Kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kegiatan belajar-mengajar setiap program studi akan disusun oleh kepala sekolah untuk kurikulum, sarana dan prasarana, serta kesiswaan akan disusun oleh Bendahara sekolah dan masing-masing guru kelas, dari kebutuhan-kebutuhan tersebut akan dipilih kembali yang benar-benar menjadi prioritas sekolah. Hal ini juga di jelaskan oleh kepala sekolah SDN Poris pelawad 5:

*“Yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan, melihat skala prioritas karena tiap tahun juga kebutuhan bisa berbeda, serta mempertimbangkan beberapa manfaat-manfaat yang akan diambil. Kemudian setelah mengidentifikasi berbagai kebutuhan kita adakan musyawarah dengan komite sekolah. Misal sekolah mengeluarkan biaya untuk pengadaan computer, nah setelah ada computer itu apa yang dihasilkan ke kita, apakah dengan itu siswa akan lebih melek teknologi. Atau kita adakan alat kesenian dan olahraga, dari alat itu buat sekolah apa manfaatnya, ada produk apa yang bisa ditimbulkan. Dari alat-alat tadi juga dapat memunculkan prestasi-prestasi siswa. Pemanfaatan biaya tadi tidak hanya di ukur seberapa untung sekolah secara nominal, tapi lebih kepada membangun prestasi siswa, dari pembiayaan tadi bisa mendukung prestasi-prestasi di sekolah”*

Dalam perencanaan pembiayaan, SDN Poris Pelawad 5 melakukan langkah-langkah penyusunan RKAS, yaitu lebih awal menyusun apa saja kebutuhan sekolah yang akan ditingkatkan untuk tahun ajaran baru yang dilakukan oleh masing-masing elemen tim manajemen sekolah. Lalu, dilakukan pembahasan bersama kepala sekolah sebagai pemegang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan nantinya akan dibahas dan sosialisasikan kepada seluruh guru.

## **Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang**

Selain itu dalam hal perencanaan pembiayaan SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang mengikuti pola atau alur yang dilakukan dalam penyusunan RKAS sekolah. Dan dalam perencanaan pembiayaan di SDN Poris Pelawad 5 dengan langkah-langkah penyusunan anggaran mulai dari penyusunan RKAS serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dilanjutkan dengan mengklasifikasi, selanjutnya mengembangkan apa yang telah menjadi prioritas sampai pada mengajukan RKAS yang telah rampung. Dalam hal ini semua langkah tersebut dilaksanakan dengan baik dan tersistem oleh SDN Poris Pelawad 5, sehingga memudahkan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembiayaan.

Penyusunan RKAS SDN Poris Pelawad 5 disusun setiap awal tahun ajaran dan untuk satu tahun anggaran. Anggaran di hitung berdasarkan kegiatan MBS (Masa Belajar Siswa). MBS dilakukan pada saat siswa masuk dan siswa diterima di sekolah. Disana mulai dihitung jumlah siswa, jumlah dana setiap siswa, dan semua yang berhubungan dengan pengeluaran siswa selama satu tahun. dijelaskan juga oleh kepala sekolah mengenai sumber biaya yang didapatkan yaitu:

*“Sumber pembiayaan Pendidikan di SDN Poris Pelawad 5 ini berasal dari dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat, juga ada dana BOP yang berasal dari Pemerintah Daerah. Selain itu juga ada bentuk-bentuk sukarela masyarakat lainnya.”*

Pemasukan pembiayaan pendidikan di SDN Poris Pelawad 5 meliputi:

### **1) BOS Nasional**

Sumber dana utama pembiayaan SDN Poris Pelawad 5 adalah BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dana BOS dibagi menjadi dua yaitu BOS Nasional yang merupakan anggaran dana BOS dari pemerintah pusat dan BOS Daerah yang berasal dari pemerintah daerah.

### **2) BOS Daerah**

Selain BOS Nasional, sumber pembiayaan SDN Poris Pelawad 5 berasal dari BOS Daerah. Sumber biaya yang berasal dari pemerintah daerah ini hanya digunakan untuk membayar honorarium tenaga pendidik dan buku cetak SDN Poris Pelawad 5

### **3) Sumbangan Sukarela**

Sumber dana ketiga sekaligus sebagai sumber dana alternatif yaitu Dana Sumbangan Sukarela yang berasal dari peserta didik. Pemungutan sumbangan

sukarela ini dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan suluruh wali murid SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang meskipun adanya aturan dari pemerintah untuk tidak ada pengutan apapun kepada peserta didik. Sumbangan sukarela ini tidak bersifat memaksa, artinya peserta didik bisa memilih untuk bayar atau tidak, bagi peserta didik yang ingin membayar, besar nomina disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing peserta didik.

Kepala sekolah SDN Poris Pelawad 5 sangat bertanggung jawab atas segala hal yang berkesinambungan dalam kegiatan sekolah salah satunya pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi sangat riskan jika adanya kesalahan walau sedikit. Kepala sekolah SDN Poris Pelawad 5 selalu ikut serta dalam pelaksanaan pembiayaan baik dari penerimaan atau pengeluaran biaya itu sendiri, agar tidak keluar dari jalur yang di tetapkan dalam penyusunan RKAS. Hal di atas disampaikan oleh kepala sekolah terkait peran kepala sekolah dalam pembiayaan di SDN Poris pelawad 5:

*“Peran kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan Pendidikan yaitu sebagai penanggung jawab, pengelola, pengawas, pengguna anggaran, serta perumus perencanaan anggaran pembiayaan di sekolah. Sehingga kalau ada bentuk-bentuk penyelewengan maka kepala sekolah duluan yang kena karena juga dalam laporan telah ada tanda tangan dari kepala sekolah.”*

Sedangkan Bendahara SDN Poris Pelawad 5 bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pembiayaan baik pengeluaran dan penerimaan. Namun, setiap dana yang akan keluar untuk pembiayaan harus diketahui dan disetujui kepala sekolah. Setelah kepala sekolah menyetujui, bendahara dapat mengeluarkan dana sesuai kebutuhan. Dalam pengeluaran dana bendahara harus memperhatikan skala prioritas agar tidak terjadi pemborosan

Setelah menerima biaya Pendidikan, biaya tersebut dikelola dengan mengacu kepada 8 (delapan) standar nasional pendidikan disekolah, Adapun standar Pendidikan yang termasuk ke dalam biaya operasional SDN Poris Pelawad 5 tersebut meliputi:

1. Pengembangan Kompetensi Lulusan. Penyusunan Kriteria ketuntasan minimal, penyusunan kriteria kenaikan kelas, pelaksanaan Try out UASBN tingkat Kecamatan, pelaksanaan ujian sekolah tingkat. Kota, pemantapan persiapan

ujian, pelaksanaan Ujian Sekolah, Pelaksanaan Assesment Kompetensi Minimum instalasi jaringan AKM.

2. Pengembangan standar isi. Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, penyusunan program semester, penyusunan silabus, penyusunan RPP, penyusunan analisis hasil belajar, melaksanakan WS analisis konteks KTSP
3. Pengembangan standar proses. Kegiatan pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang meliputi pengadaan sarana penunjang KBM (ATK KBM), buku administrasi guru kelas, pulsa siswa untuk pembelajaran daring, pengadaan alat pembelajaran. Kemudian juga program kesiswaan yang meliputi penyusunan program kesiswaan, pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru
4. Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Program ini diisi dengan melaksanakan kegiatan rapat pembinaan dewan guru dan tenaga kependidikan.
5. Pengembangan sarana dan Prasarana sekolah. Pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat kantor/inventaris sekolah yang meliputi; pemeliharaan dan perawatan alat kantor/inventaris sekolah, pengadaan alat kantor/inventaris sekolah. Kemudian juga ada pemeliharaan dan perbaikan Gedung yang meliputi; pemeliharaan Gedung sekolah, sarana cuci tangan. Dan juga ada pemeliharaan dan perbaikan taman.
6. Pengembangan standar pengelolaan. Kegiatan pengembangan manajemen sekolah yang meliputi; penyusunan visi dan misi sekolah, penyusunan profil sekolah, penyusunan RKAS. Juga ada kegiatan pengelolaan perkantoran yang meliputi; pengadaan sarana pendukung perkantoran, pengelolaan dana BOS dan BOP, penggandaan laporan, kegiatan hubungan masyarakat.
7. Pengembangan standar pembiayaan. Kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa yang meliputi; konsumsi guru/pegawai, obat-obatan P3K, kebutuhan masa pandemi covid 19, rekening listrik, tabloid, koran, internet, instalasi internet, jasa tenaga kependidikan, alat kebersihan dan bahan pembersih.
8. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Pelaksanaan penilaian yang meliputi; ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, Assesmen Nasional Berbasis computer.

Dari ketetapan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengalokasian dana untuk pembiayaan pendidikan disuatu sekolah sudah jelas diperuntukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, mensejahterakan pendidik dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana prasarana dan pelaksanaan proses evaluasi peserta didik serta kegiatan lainnya yang menunjang dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Selanjutnya penggunaan biaya Pendidikan tadi dilaporkan secara bertahap ke instansi terkait Pemerintah Daerah per 4 bulan atau per triwulan, nanti juga ada laporan tahunan. Kepala sekolah menyampaikan laporan penggunaan biaya pendidikan kepada Walikota melalui kepala dinas pendidikan kota. Ada tiga jenis bentuk peraturan, dalam bentuk website yang disediakan oleh kemendikbud, kemudian ada juga dalam bentuk cetak untuk ditujukan ke dinas kota, juga pelaporan ke kemendagri. Pelaporan pembiayaan sekolah ini dinilai sangat penting dilakukan karna dapat berkenaan langsung dengan jabatan kepala sekolah.

SDN Poris Pelawad 5 memiliki laporan yang jelas, dalam hal ini tertuang pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban yang dilakukan oleh kepala sekolah, bendahara dan guru terkait dengan pelaporan pembiayaan pada SDN Poris Pelawad 5. Pelaporan yang disajikan oleh pihak SDN Poris Pelawad 5 sudah sesuai standardisasi yang ditetapkan SDN Poris Pelawad 5 pada pola evaluasi pembiayaan dilakukan setiap pertengahan tahun ajaran dan diakhir tahun ajaran. Fokus evaluasi pembiayaan yaitu mengenai pemasukan dan pengeluaran dana. Yang ditunjuk untuk pelaksanaan belajar dan pembelajaran di sekolah.

Dari evaluasi ini dapat dilihat apakah pengeluaran pembiayaan yang dilakukan sekolah sudah sesuai dengan RKAS atau sebaliknya. SDN Poris Pelawad 5 dalam mengevaluasi pembiayaan dengan cara mengumpulkan informasi dalam rapat yang diikuti seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SDN Poris Pelawad 5 untuk mengetahui apa saja yang menjadi evaluasi pembiayaan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan dari hasil penelitian ini, antara lain: yaitu Pengelolaan

## **Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang**

Pembiayaan Pendidikan Di SDN Poris Pelawad 5 Kota Tangerang melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi. Dalam hal perencanaan Pengelolaan pembiayaan di SDN Poris Pelawad 5 dilakukan oleh seluruh elemen tim manajemen sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara dan anggota yang merupakan dari unsur guru, unsur komite dan unsur orang tua siswa. Selain itu termasuk juga instansi dari dinas Pendidikan selaku pengawas dan pembina. Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan Pendidikan di SDN Poris Pelawad 5 dikelola dengan mengacu kepada 8 (delapan) standar nasional pendidikan disekolah yang meliputi 1) Pengembangan Kompetensi Lulusan, 2) pengembangan isi, 3) pengembangan standar proses, 4) pengembangan Pendidikan dan tenaga kependidikan, 5) pengembangan sarana dan prasarana sekolah, 6) pengembangan standar pengelolaan, 7) Pengembangan standar pembiayaan, 8) Pengembangan dan implementasi system penilaian. Adapun kegiatan evaluasi dalam pengelolaan pembiayaan Pendidikan di SDN Poris pelawad 5 ini setiap pertengahan tahun ajaran dan diakhir tahun ajaran. Fokus evaluasi pembiayaan yaitu mengenai pemasukan dan pengeluaran dana. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dalam rapat yang diikuti seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SDN Poris Pelawad 5 untuk mengetahui apa saja yang menjadi evaluasi pembiayaan.

### **Daftar Pustaka**

- Akdon et. al. Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Akhmad. "Perencanaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Globalisasi," Jurnal Scholastica, Vol. 2, No.2, 2020.
- Arikunto, Suharsimi, Pengelolaan Kelas Dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Armidah, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Efisiensi dan Keefektifan Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar," Jurnal Madrasah, Vol. 3, No.2, 2011.
- Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: RosdaKarya, 2002.
- Minarti, Sri, Manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.

- Nur, Muhammad, et. al, “Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie,” Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No.1, Februari, 2016.
- Rojli, Muhammad, et. al, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2020.
- Supriadi, Dedi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja RosdaKarya, 2004).
- Tsaqif, Muhammad, “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Zamjani, Irsyad, et. al , “Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Satuan Pendidikan Formal,” Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.